

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cita-cita setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Adanya keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* tidak lepas dari peran birokrasi itu sendiri. Birokrasi menurut perspektif Politik Pemerintahan merupakan *machinery state* atau mesin negara¹. Keberadaan birokrasi menjadi hal yang sangat krusial mengingat peran nya sebagai *machinery state*. Sehingga kinerja birokrasi otomatis menjadi salah satu faktor penting jika suatu negara ingin mencapai kondisi *Good Governance*.

Kinerja birokrasi pemerintah di Indonesia selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan mengingat masih banyak masyarakat yang memiliki krisis kepercayaan pada pihak aparatur negara pelaksana birokrasi. Maka dari itu, lambat laun masing-masing instansi pemerintah di Indonesia mulai mencari solusi bagaimana cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali dan meminimalisir krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Pada saat ini di setiap instansi pemerintah di Indonesia, telah tercipta suatu sistem akuntabilitas atau sebagai media pertanggungjawaban kinerja dari instansi pemerintah terkait yang dapat diakses oleh masyarakat, yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa disingkat SAKIP.

¹ Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Budi Setiyono. 2012

Kehadiran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat menempatkan pemerintah untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menjadi pelayan publik dan aparatur negara, karena terefleksikan dari sistem SAKIP tersebut, dimulai dari tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga pemanfaatan informasi kinerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Kehadiran SAKIP salah satunya juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan krisis kepercayaan dari masyarakat mengenai kinerja instansi pemerintah yang sering dianggap belum memuaskan, sehingga SAKIP selanjutnya dapat menempatkan masyarakat untuk tidak selalu menyalahkan atau mempertanyakan kinerja aparatur instansi pemerintah terkait karena semua sudah dapat dilihat secara transparan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun LAKIP, merupakan salah satu instrument dari SAKIP. SAKIP sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari Rencana Strategis atau Renstra, Indikator Kinerja Utama atau IKU, Rencana Kegiatan Tahunan atau RKT, Penetapan Kinerja atau TAPKIN dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Di Indonesia sendiri, hampir semua pemerintah daerah sudah menerapkan sistem transparansi akuntabilitas kinerja. Hal ini menandakan bahwa hampir semua pemerintah daerah di Indonesia memiliki keinginan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, dimulai dari dibuatnya sistem yang dapat melihat keseluruhan kinerja birokrasi, yang selalu di perbaharui berkala tiap tahun. Kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas juga terlihat dari Ibukota Republik Indonesia, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, terlihat dari telah dipakainya sistem akuntabilitas kinerja yang dikenal dengan nama SAKIP.

Berangkat dari sistem akuntabilitas kinerja tersebut, fenomena yang menarik perhatian penulis ialah nilai yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung merefleksikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun bukan yang terbaik, namun selalu mengalami perkembangan baik di tiap tahunnya. Meskipun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta telah dipimpin oleh 3 gubernur aktif berbeda. Yakni Ahok pada tahun 2014-2017, dilanjutkan oleh Djarot yang menjabat sebagai Gubernur sementara di tahun 2017, kemudian tonggak kepemimpinan beralih pada Anies Baswedan untuk masa jabatan 2017-2022.

Fenomena ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam mengingat banyak dari masyarakat Indonesia sendiri merasa bahwa instansi pemerintah dianggap kurang akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. Adanya krisis kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk melakukan akuntabilitas birokrasi menurut peneliti dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya ialah kurangnya kesadaran masyarakat pada informasi yang berkaitan dengan perkembangan kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan akuntabilitas birokrasi demi tercapainya *good governance*.

Fenomena ini menjadi lebih menarik untuk dikaji jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi objek penelitian. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta secara tidak langsung selalu dilihat sebagai representative dari tata kelola pemerintahan dari Indonesia itu sendiri. Sehingga

hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, terkhusus pada peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi menjadi layak untuk diperbincangkan dan dikaji mengingat Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari pemerintahan di Indonesia. Sehingga perkembangan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menjadi suatu pembahasan yang menarik.

Berbicara mengenai peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, terfokus pada kinerja pemerintah dengan objek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, dapat dilihat melalui perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa dikenal sebagai SAKIP.

Pada prinsip Good Governance, salah satu faktor penentu suatu pemerintahan tergolong memiliki tata kelola pemerintahan yang baik yakni jika instansi pemerintah tersebut menerapkan prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini, indikator akuntabilitas suatu instansi pemerintah dapat tercermin dari apa yang kita kenal sebagai SAKIP, dimana bentuk pelaporan kepada KemenPAN RB akan dikemas dalam bentuk LAKIP.

Dalam 5 tahun terakhir pada kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia mengalami peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi – yang selanjutnya disingkat menjadi Kemenpan RB – menjadi perhatian khusus bagi penulis. Pasalnya, pada tahun 2015, Pemprov DKI mendapat skor 58,57 atau setara CC.2 Di tahun 2016, Pemprov DKI mendapat skor 60,13 atau setara B. Di tahun

http://www.beritajakarta.id/read/45029/Akuntabilitas_Kinerja_Pemprov_DKI_Raih_Predikat_B#.XjVIRRMzY4Y

2017, Pemprov DKI mendapat skor 62 atau setara B. Di tahun 2018, Pemprov DKI mendapat skor 71,04 atau setara BB₃, dan di tahun 2019, Pemprov DKI mendapat skor 73,8 atau setara BB dari Kemenpan RB.⁴

Lahirnya skor SAKIP atau nilai tingkat akuntabilitas kinerja pada instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yakni :

- 1) Perencanaan Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja
- 3) Pelaporan Kinerja
- 4) Evaluasi Internal
- 5) Capaian Kinerja

Penilaian SAKIP yang diberikan oleh KemenPAN dan RB berangkat dari 5 (lima) indikator tersebut. Dengan bobot yang berbeda pada masing-masing indikator. Komponen Perencanaan Kinerja diberikan bobot nilai sebesar 30/100, komponen pengukuran kinerja diberikan bobot nilai sebesar 25/100, komponen pelaporan kinerja diberikan bobot nilai sebesar 15/100, komponen evaluasi internal diberikan bobot sebesar 10/100 dan komponen capaian kinerja diberikan bobot nilai sebesar 20/100. Sehingga total dari keseluruhan komponen penilaian ialah 100.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang

³ <https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/239>

⁴ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-akan-serahkan-rapor-sakip-161-pemda>

dirancang untuk tujuan penetapan serta pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP).⁵ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa pengimplementasian SAKIP harus fokus pada penetapan *outcome* yang akan dicapai dengan target yang terukur, serta sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sehingga kunci keberhasilan SAKIP sejatinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas. Berdasar hal ini, penulis selanjutnya akan meneliti faktor apa saja yang melatarbelakangi peningkatan nilai SAKIP yang diperoleh Pemprov DKI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2015–2019. Serta apakah dalam usaha Pemprov DKI meningkatkan nilai SAKIP sudah mengimplementasikan ciri-ciri pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Peneliti memutuskan untuk meneliti akuntabilitas kinerja provinsi DKI Jakarta dari perspektif nilai SAKIP karena berkaca dari pernyataan Deputy bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PAN RB – Muhammad Yusuf Ateh – bahwa SAKIP dapat merepresentasikan komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan *good governance* dan *clean government*.⁶ Pimpinan instansi pemerintah terkait harus merubah pola pikir sehingga kedepannya program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Salah satu upaya

⁵ <http://inspektorat.jakarta.go.id/berita/detail/optimalisasi-implementasi-sakip-pada-pemerintah-provinsi-dki-jakarta>

⁶ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perbaiki-sakip-tak-cukup-hanya-kerja-tapi-harus-berkinerja>

dalam mencapai cita-cita tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel adalah melalui penerapan SAKIP.

Adanya fenomena peningkatan nilai yang terus menerus pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti faktor pendukung kenaikan skor akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penulis akan meneliti tidak hanya alasan dibalik skor laporan peningkatan kinerja birokrasi, tetapi penulis juga akan meneliti mulai dari pentingnya akuntabilitas dari sudut pandang aparatur pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apakah sebenarnya SAKIP memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, hingga faktor penyebab peningkatan skor SAKIP milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2015–2019.

Pengkajian mengenai penting atau tidak nya faktor akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga alasan meningkatnya skor SAKIP Pemprov DKI perlu dilakukan sehingga kedepannya peningkatan nilai SAKIP tidak hanya berhenti di tahun 2019, tetapi terus mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya karena faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan skor SAKIP akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, dengan harapan peningkatan SAKIP Pemprov DKI dapat segera mencapai nilai AA dan keinginan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* semakin jelas dan nyata, serta besar kemungkinannya untuk dicapai.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada latar belakang empirik dan teoritis yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Apa saja faktor yang menyebabkan peningkatan nilai implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019?

1.2.2 Bagaimana nilai implementasi SAKIP berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

1.2.3 Apakah akuntabilitas penting menurut penyelenggara birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

1.2.4 Apakah akuntabilitas penting menurut masyarakat Provinsi DKI Jakarta, serta apakah peningkatan nilai implementasi SAKIP Pemprov DKI Jakarta sudah dapat dirasakan oleh Masyarakat Provinsi DKI Jakarta?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Untuk mengetahui faktor penyebab peningkatan SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019.

1.3.2 Untuk mengetahui kontribusi SAKIP dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3.3 Untuk mengetahui seberapa penting akuntabilitas menurut penyelenggara birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3.4 Untuk mengetahui seberapa penting akuntabilitas menurut masyarakat Provinsi DKI Jakarta, serta mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta mengenai peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasar uraian diatas, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah pada masyarakat, sehingga birokrat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat sebagai warga negara juga dapat dipenuhi hak nya sebagai warga negara. Dalam hal ini, maka akan memberikan wawasan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dari perspektif pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai yang meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir tetapi belum berbanding lurus dengan yang dirasakan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
- b. Bagi pemerintah, bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi. Kemudian sebagai bahan masukan dan koreksi dalam usahanya meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrat tidak hanya dalam administrasi tetapi dalam pelaksanaannya pada masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
- c. Bagi masyarakat dan para stakeholder, dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui tingkat responsivitas Pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja birokrat Provinsi DKI Jakarta.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai akuntabilitas menurut *Good Governance* cukup banyak dilakukan, mengingat akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar terciptanya *Good Governance*. Diantara hasil penelitian, penulis menemukan beberapa data sebagai berikut :

Penelitian pertama yaitu Sangkala Rewa (2015) yang berjudul “*Akuntabilitas dalam Perspektif Governance*”. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah lahirnya perspektif baru mengenai akuntabilitas dalam perspektif *good governance* tidak hanya menekankan pada

efisiensi penggunaan sumberdaya tetapi lebih jauh mengenai bagaimana sumberdaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel.⁷

Penelitian kedua yakni milik Wala Siti Nurlaela (2015) yang berjudul *Pengaruh Good Government Governance dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Survei pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis*. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian *mix-method*. Hasil penelitian ini berbicara mengenai pengaruh *good government governance* dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Pengaruh *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah juga tergolong signifikan dan memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 67,1%. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah juga memiliki hubungan yang cukup kuat, yakni sebesar 91,7% dimana hal ini berarti akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah memiliki hubungan yang kuat. Hasil penelitian ini menyatakan, secara simultan *good governance* dan akuntabilitas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini terlihat dari hasil uji determinasi sebesar 93,5% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain.⁸

1.5.2 Good Governance

Suatu tata kelola pemerintahan dapat dikategorikan memiliki tata pemerintahan yang baik atau biasa dikenal sebagai *good governance* jika memenuhi

⁷ Rewa, Sangkala. 2015. *Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance*. Makassar : Universitas Hasanuddin.

⁸ Nurlaela, Wala Siti. 2015. *Pengaruh Good Government Governance dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Survei Pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.

beberapa faktor pelaksanaan *good governance* menurut UNDP dalam Mardiasmo, 2002⁹ :

a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

b. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. *Transparency*, dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.

d. *Responsiveness*, Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

e. *Consensus Orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

g. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)

h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan

i. *Strategic Vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

⁹ Wiwik Andriani. Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang Vol. 10 No. 2 Desember 2015 ISSN 1858-3687 Hal 56

Menurut Mahathir Muhammad, mendefinisikan bahwa *Good Governance* merupakan pelaksanaan dari otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam kaitannya dengan pengelolaan negara.

Dalam kacamata ilmu politik, akuntabilitas sering dipandang para cendekiawan sebagai payung konseptual yang mencakup banyak konsep, termasuk sinonim untuk berbagai kebutuhan definisi politik seperti tanggungjawab, demokrasi, transparansi, responsivitas, keadilan, efisiensi dan integritas. Terminologi ini menjadi terminologi umum untuk berbagai macam mekanisme yang membuat institusi lebih responsif terhadap publiknya. Para cendekiawan pun sering menggunakan kata akuntabilitas berdampingan dengan *good governance*. Prinsip akuntabilitas dalam kacamata *good governance* menyatakan bahwa,

...siapa pun adanya, apakah dia perseorangan maupun lembaga, yang diberi wewenang oleh publik, memakai dan menggunakan fasilitas dan dana yang bersal dari public, harus bisa memberikan pertanggungjawaban pada publik atas segala sesuatu yang mereka gunakan (Moncrieffe, 2001, hlm. 27)

Akuntabilitas merupakan hal penting sebagai wujud kepastian hubungan antara rakyat sebagai pemberi hak serta wewenang dan pihak birokrasi sebagai pihak yang diberi hak dan wewenang terjadi kegiatan yang berlangsung adil. Karena tanpa adanya pertanggungjawaban, suatu birokrasi yang memiliki kuasa akan bersifat *omnipotent* (berkuasa sangat mutlak), *omnipresent* (menguasai segala hal) dan *omninous* (sangat menyebarkan) di mata masyarakat.

1.5.3 Akuntabilitas

Birokrasi sebagai institusi publik yang memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak seperti kelompok kepentingan, partai politik, termasuk juga dengan masyarakat umum, memosisikan pelaksanaan tugas birokrasi tidak mungkin terlepas dari keterkaitan dengan berbagai pihak tersebut. Maka dari itu, birokrasi

selalu dihadapkan pada berbagai bentuk pertanggungjawaban politik atau *political accountability* atau pertanggungjawaban publik (*publik accountability*). Untuk mencapai kedua hal tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Donahue (1989, h.22) bahwa usaha pencapaian tujuan publik harus disertai oleh adanya struktur desain yang prima dalam mekanisme akuntabilitas, sehingga dapat menjamin kepada warga negara bahwa tindakan terbaik akan selalu dipersembahkan oleh para penyelenggara negara.

Kaitannya dengan hal tersebut, asas akuntabilitas publik pada prinsipnya menyatakan bahwa, siapapun adanya, apakah dia perseorangan maupun Lembaga, yang diberi wewenang oleh publik, memakai dan menggunakan fasilitas dan dana yang berasal dari publik, harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas segala sesuatu yang mereka gunakan (Moncrieffe, 2001, hlm. 27).

Tanpa adanya pertanggungjawaban, kekuasaan birokrasi akan bersifat *omnipotent* (berkuasa sangat mutlak), *omnipresent* (menguasai segala hal) dan *omninous* (sangat menyebarkan) bagi masyarakat.

1.5.3.1 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Moncrieffe, pada kondisi saat ini, perlu dikembangkan pola akuntabilitas yang memiliki dua dimensi, yakni:¹⁰

- 1) *ex-post facto accountability*
- 2) *ex-ante accountability*

Ex-post facto accountability mengharuskan pejabat dan Lembaga publik untuk bertanggungjawab atas kewenangan yang ada pada mereka melalui norma hukum, monitoring system, mekanisme anggaran dan juga pemilu. Sedangkan *ex-ante*

¹⁰ Setiyono, Budi. 2016.

accountability mengharuskan pejabat publik untuk selalu merepresentasikan keinginan rakyat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil. Birokratur harus selalu mengonsultasikan secara terus-menerus setiap tindakan pada publik, memberikan penjelasan serta informasi yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan para pejabat serta merevisinya bila dipandang perlu.

1.5.4 Kinerja Instansi Pemerintah Menurut PerPres No. 29/2014

Untuk mewujudkan dua prinsip akuntabilitas kinerja tersebut, Indonesia telah menerapkan suatu system yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.¹¹

SAKIP sebagai salah satu media akuntabilitas birokrasi, merupakan kepanjangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sendiri merupakan suatu bentuk tatanan,

¹¹ Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

instrumen serta metode pertanggungjawaban yang memiliki tahapan sebagai berikut¹² :

1. Penetapan Perencanaan Strategik
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Selanjutnya, capaian kinerja tersebut dilaporkan pada pihak berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Di dalam SAKIP sendiri terdapat LAKIP, informasi yang termuat dalam LAKIP selanjutnya akan dimanfaatkan untuk landasan perbaikan kinerja instansi terkait secara berkelanjutan.

LAKIP sendiri memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang telah diperoleh instansi terkait. LAKIP merupakan sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah.

Di dalam LAKIP, terdapat kinerja instansi berserta akuntabilitasnya, yakni gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam visi, misi, tujuan, sasaran organisasi serta merupakan media akuntabilitas tiap instansi pemerintah.

LAKIP sendiri memiliki 4 (empat) dokumen di dalamnya yang dinilai, yakni :

1. Renstra / Rencana Strategik

Perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi

¹² Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 10 No 2 Desember 2015.

(kebijakan dan program) yang jelas dan mempunyai indikator yang jelas untuk mencapainya.

2. Renja / Rencana Kinerja

Merupakan proses perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra melalui berbagai kegiatan tahunan. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator- indikator kinerja input, output, benefit dan impact yang disertai dengan indikator dan rencana tingkat capaiannya.

3. Pengukuran Kinerja

Merupakan metoda pengukuran yang membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian masing- masing indikator sasaran maupun indikator kinerja kegiatan (input, output, outcomes, benefits dan impacts).

4. Evaluasi Kinerja

Kegiatan ini untuk mengetahui pencapaian realisasi setiap indikator kinerja kegiatan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam mencapai visi, misi agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang. Kemudian dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Berikut merupakan komponen yang digunakan untuk melakukan penilaian apakah suatu instansi pemerintah dapat dikatakan akuntabel atau tidak, masing-masing komponen diberikan alokasi penilaian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Indikator Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen	Bobot		Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	35%	a	Rencana Strategis 15%
			b	Rencana Kinerja Tahunan 10%
			c	Penetapan Kinerja 10%
2	Pengukuran Kinerja	20%	a	Pemenuhan pengukuran 4%
			b	Kualitas pengukuran 10%
			c	Implementasi pengukuran 6%
3	Pelaporan Kinerja	15%	a	Pemenuhan laporan 3%
			b	Penyajian informasi kinerja 8%
			c	Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4	Evaluasi Kinerja	10%	a	Pemenuhan evaluasi 2%
			b	Kualitas evaluasi 5%
			c	Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5	Capaian Kinerja	20%	a	Kinerja yang dilaporkan (output) 5%
			b	Kinerja yang dilaporkan (outcomes) 5%
			c	Kinerja Lainnya 10%
	Total	100%		

1.5.4.1 Tata Cara Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Permenpan RB No. 53/2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang berbicara mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, ditujukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 ini diterapkan sejak penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014. Dengan outline pedoman sebagai berikut:

a. Penyusunan Perjanjian Kinerja:

Perjanjian kinerja lahir dari kesepakatan pemberi amanah dan penerima amanah yang menghasilkan kesepakatan kinerja yang terukur, berdaarkan pertimbangan sumberdaya yang ada. Perjanjian kinerja bertujuan untuk; (1) memenuhi akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; (2) sebagai dasar penilaian, penghargaan dan sanksi; (3) dasar evaluasi kinerja aparatur; (4) dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise; (4) dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut merupakan format Lampiran Perjanjian Kinerja yang dilakukan tiap tahun nya:

Tabel 1.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1

b. Penyusunan Pelaporan Kinerja :

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai uraian singkat organisasi seperti tugas dan fungsi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan atau disebut Perjanjian Kinerja, pengukuran capaian perjanjian kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Berisikan juga Bab mengenai Akuntabilitas Kinerja yang berisikan : (1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini; (2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sistem penyampaian pelaporan kinerja ini dimulai dari Pimpinan Satuan Kerja, dilanjutkan ke Pimpinan Unit Kerja, Menteri / Pimpinan Lembaga, dilanjutkan pada Kemen PPN / BAPPENAS, dilanjutkan pada Kemenkeu dan terakhir yakni pada Kemen PANRB.

c. **Reviu atas Laporan Kinerja :**

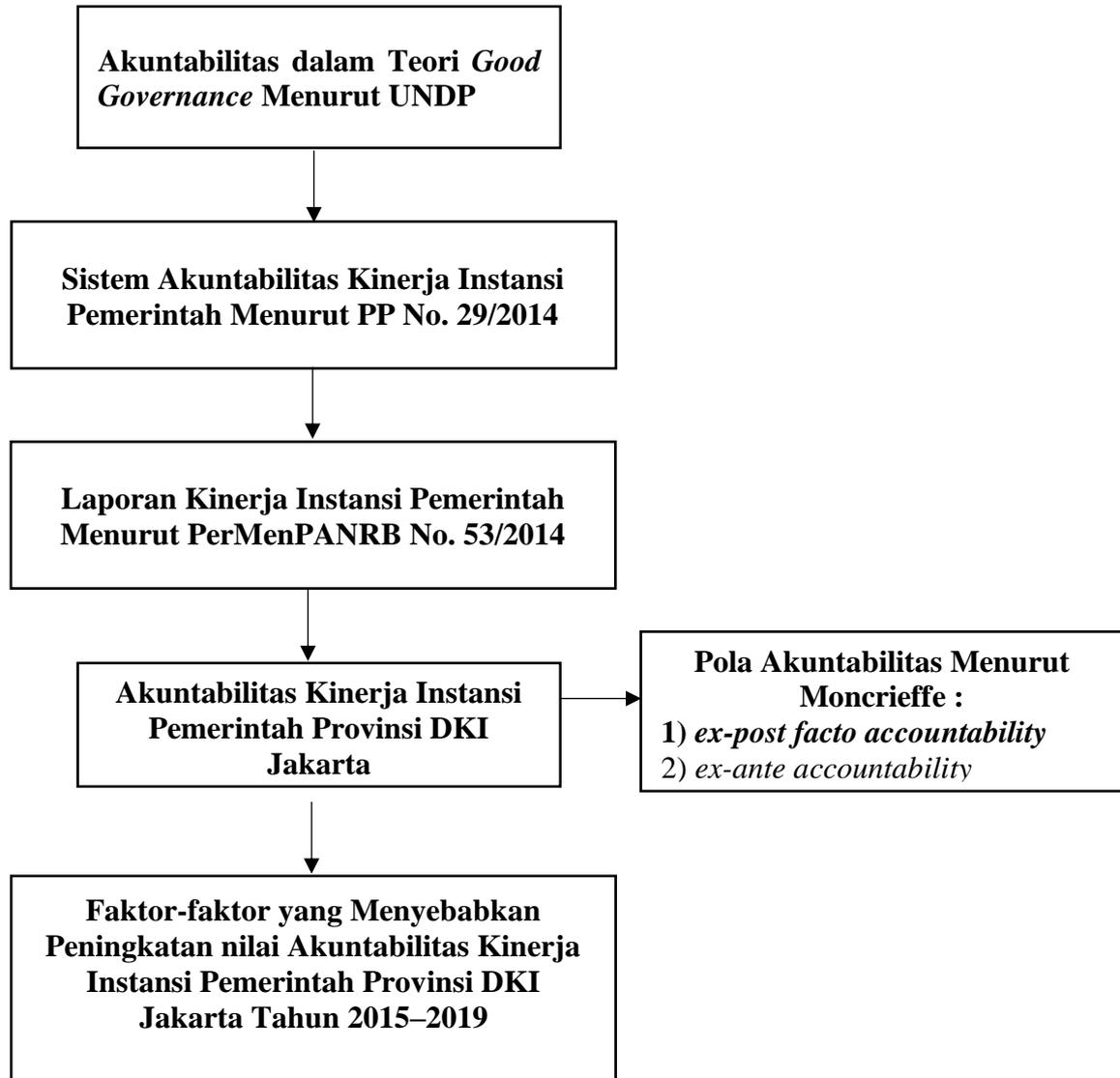
Reviu Kinerja bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Kertas kerja reviu setidaknya mencakup; (1) hasil pengujian keandalan dan akurasi data

dan informasi kinerja; (2) telaahan aktivitas penyelenggaraan SAKIP; (3) langkah reuiu; (4) hasil reuiu.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Gambar 1.1

Kerangka Pikir



1.7 OPERASIONALISASI KONSEP

Tabel 1.3
Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	Prinsip Akuntabilitas dalam Good Governance (Sedarmayanti 2007:23)	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	a. Kinerja berdasar pada Renstra
		Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	a. Penerapan sanksi pada tiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
		Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan	a. Dibuatnya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

		perundang-undangan	
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah	a. Peningkatan kepercayaan masyarakat meningkat tiap tahun
2	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut PP No. 29/2014</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,</p>	<p>Penyelenggaraan SAKIP</p>	<p>a. Rencana Strategis</p> <p>b. Perjanjian Kinerja</p> <p>c. Pengukuran Kinerja</p> <p>d. Pengelolaan Data Kinerja</p> <p>e. Pelaporan Kinerja</p> <p>f. Reviu dan Evaluasi Kinerja</p>

	<p>pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p>		
3	<p>Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Menurut PerMenPANRB No. 53/2014</p> <p>Suatu aktivitas yang menjadi pilar utama <i>good governance</i></p>	Perjanjian Kinerja	<p>a. Sasaran Strategis</p> <p>b. Indikator Kinerja</p> <p>c. Target</p>
		Laporan Kinerja	<p>a. Uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi)</p> <p>b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja)</p> <p>c. Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja</p> <p>d. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja</p>

	yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak birokrat terhadap masyarakat sebagai pemberi hak dan wewenang,	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	a. hasil pengujian keandalan dan akurasi data dan informasi kinerja b. telaahan aktivitas penyelenggaraan SAKIP c. langkah reviu d. hasil reviu
--	---	---	--

Sumber : Data Diolah tahun 2020

1.7.1 Operasionalisasi Teori *Good Governance*

Latar belakang agenda reformasi birokrasi dilakukan salah satunya ialah untuk menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut sebaga *Good Governance*. Suatu pemerintahan dapat dikategorikan *good governance* apabila terdapat 8 faktor tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 5 (lima) pilar utama dala *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas pemerantasan korupsi, partisipasi serta kepastian hukum. Pilar penting *good governance* salah satu nya ialah pemerintahan yang akuntabel.

Berkaitan dengan faktor tersebut, akuntabilitas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga berhubungan dengan salah satu pilar penting *good governance* yakni perwujudan birokrasi bersih dan akuntabel. Berdasarkan definisi *good governance* oleh Mahathir Muhammad pula, *Good Governance* sebagai pelaksanaan dari otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam kaitannya

dengan pengelolaan negara. Hal ini menjadi cermin pelaksanaan proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Usaha pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memiliki nilai yang baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikemas dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), akan dilihat lebih lanjut apakah dalam proses nya pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga akan diketahui apakah peningkatan nilai SAKIP akan berbanding lurus dengan keberhasilan pengimplementasian *Good Governance* dan sebaliknya.

1.7.2 Operasionalisasi Teori Akuntabilitas

Terdapat 5 komponen LAKIP yang dijadikan sebagai indikator penilaian. Komponen pertama ialah Komponen Perencanaan Kinerja, dengan 3 (tiga) sub komponen lain yakni sub komponen renstra, sub komponen perencanaan kinerja tahunan, dan sub komponen penetapan kinerja. Dari sub komponen Renstra, akan di telaah pada LAKIP Pemerintah DKI sejak tahun 2015–2019, apakah renstra di masing-masing tahun terkait sudah menggambarkan dengan jelas visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah serta apakah renstra sudah mengacu pada renstra di atasnya. Selanjutnya akan ditelaah apakah sasaran strategis yang ditetapkan apakah sudah berorientasi pada hasil. Serta apakah implementasi renstra telah digunakan dalam acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan apakah telah melakukan revidi secara berkala.

Komponen kedua ialah Komponen Pengukuran Kinerja, akan ditelaah apakah dokumen LAKIP Pem DKI dari kurun waktu yang telah ditentukan, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.

Komponen ketiga ialah Komponen Pelaporan Kinerja, akan ditelaah apakah dokumen LAKIP Pemerintah DKI telah disampaikan tepat waktu ke Kemenpan RB. Selanjutnya akan ditelaah terkait dengan penyajian informasi kinerja, apakah LAKIP Pem DKI telah menyajikan kemajuan pencapaian target jangka menengah. Serta berkaitan dengan pemanfaatan, apakah informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program serta kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan digunakan untuk penilaian kinerja.

Komponen keempat ialah Komponen Evaluasi Kinerja, akan ditelaah apakah sudah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta apakah hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk kepentingan perbaikan kinerja.

Komponen kelima ialah Komponen Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi. LAKIP Pemerintah DKI Jakarta akan ditelaah apakah target kinerja *output* dan *outcome* sudah tercapai sepenuhnya atau belum.

1.8 METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu permasalahan secara spesifik, tujuannya untuk menemukan, menggambarkan, mengembangkan atau mengetahui suatu kebenaran dari fenomena yang diteliti melalui mengumpulkan, menyusun dan merangkai suatu masalah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam karya ilmiah. Menurut buku John W. Creswell, metode penelitian terdapat berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya.¹³ Metode penelitian ini

¹³ John W. Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi IV*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 332

dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan *mix-methods*, yakni campuran kualitatif dan kuantitatif.

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan jenis *mix-method*. Dalam penelitian ini lebih utama menggunakan penelitian kualitatif sebagai data primer dan penelitian kuantitatif sebagai data pendukung atau data sekunder. Pencampuran dan penggabungan data ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat mengenai rumusan masalah daripada dilakukan secara satu demi satu. Mengacu pada pengertian dalam buku John W. Creswell dengan judul *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, yang dimaksud penelitian campuran ialah :

“Pendekatan untuk menyelidiki suatu objek dengan mengombinasikan bentuk penelitian kualitatif dan bentuk penelitian kuantitatif. Metode ini juga melibatkan asumsi filosofis, penggunaan penekatan kualitatif dan kuantitatif serta campuran antara dua pendekatan dalam sebuah penelitian.”¹⁴

Menurut Creswell, strategi – strategi yang terdapat dalam *mix – methods*, yakni:

1. Strategi metode campuran sekuensial / bertahap (*sequential mixed methods*)

Peneliti menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lain. Peneliti melakukan strategi ini melalui interview terlebih dahulu untuk mendapat data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dengan menggunakan survey. Strategi ini sendiri terbagi kedalam tiga bagian, yakni :

a. Strategi Eksplanatoris Sekuensial

¹⁴ Ibid., hlm. 330

Dalam strategi ini, penulis dalam tahap pertama harus mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian dilakukan pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasar hasil awal kuantitatif. Prioritas dalam strategi ini diberikan pada data kuantitatif.

b. Strategi Eksploratoris Sekuensial

Dalam strategi ini, tahapan yang harus dilakukan peneliti berkebalikan dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama strategi ini ada pada data kualitatif.

c. Strategi Transformatif Sekuensial

Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada masing-masing tahap penelitian.

2. Strategi Metode Campuran Konruen / Sewaktu-waktu (*concurrent mixed methods*)

Penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Terdapat tiga strategi pada strategi metode campuran konruen, yakni:

a. Strategi Triangulasi Konruen

¹⁵ Creswell, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed-Method*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. Hal 320-324.

Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.

b. Strategi Embedded Konruen

Dalam strategi ini hampir mendekati model triangulasi konruen, karena keduanya sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Hal yang membedakan ialah model ini memiliki metode primer yang memandu proyek dan data sekunder yang memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode sekunder kurang begitu berperan dominan (baik itu dalam kualitatif maupun kuantitatif) ditancapkan (*embedded*) ke dalam metode yang lebih dominan (kualitatif dan kuantitatif).

c. Strategi Transformatif Konruen

Strategi ini dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu. Prosedur metode campuran transformatif merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan kaca mata teoritis sebagai perspektif *overarching* yang didalamnya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil yang diharapkan dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. Tahapan yang harus dilakukan peneliti berkebalikan dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015–2019, dan wawancara yang

dilakukan pada pihak birokrat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua berupa kuesioner yang disebar pada masyarakat, dan yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama strategi ini ada pada data kualitatif.

Data primer yang bersifat sebagai data utama, dikumpulkan melalui penelitian langsung ke lokasi penelitian yakni Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lebih spesifik penelitian dilakukan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggungjawab Tim SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Tim SAKIP. Peneliti akan mendapatkan data primer dengan teknik wawancara dimana pemilihan informan dilakukan peneliti menggunakan penggabungan dua teknik yakni teknik *purposive* dan *snowball sampling* dan penyebaran kuesioner pada masyarakat. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan pencarian dari sumber-sumber lain yang berasal dari penelitian terdahulu, berita, serta pengumpulan arsip pernyataan dan *press release* yang peneliti harap dapat mejadi fakta pendukung lain, terutama dalam hal penjelasan mengenai usaha peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir terhitung sejak 2015–2019.

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Tipe pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yakni ialah Deskripsi *Explanatory*.¹⁶

¹⁶ Sinulingga, Sukaria. 2013. Metode Penelitian. Edisi Ketiga. Medan : USU Press.

- Deskripsi *Explanatory, metode explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagai kota yang menjadi Ibukota Republik Indonesia, kinerja para aparatur negara terkait kerap kali menjadi sorotan banyak pihak terutama dari banyak daerah lain di Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi sasaran penulis ialah pihak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggungjawab Tim SAKIP Pemprov DKI Jakarta, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Tim SAKIP Pemprov DKI Jakarta. Serta Biro Pemerintahan dan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai perwakilan dari non-tim SAKIP Pemprov DKI Jakarta, dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

1.8.4 Teknik Penetapan Informan

Untuk teknik penetapan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto *purposive sampling* adalah proses pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, yakni Tim SAKIP Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari pihak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggungjawab Tim SAKIP Pemprov DKI Jakarta, dan

BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, serta 2 (lima) Biro lain yang tidak termasuk dalam Tim SAKIP Pemprov DKI Jakarta yakni Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan SAKIP untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Peneliti juga akan mengambil *sample* dari responden masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang ditentukan menggunakan metode Frank Lynch. Peneliti akan menentukan responden masyarakat secara *random sampling* dengan perbandingan pria dan wanita sebesar 50:50.

Perhitungan sample dilakukan dengan rumus Frank Lynch (Sugiarto, 2001:60) sebagai berikut :

$$n = \frac{NZ^2P(1 - P)}{NE^2 + Z^2P(1 - P)}$$

Keterangan:

n = banyaknya sampel

N = jumlah populasi

Z = nilai standar sesuai dengan tingkat kepercayaan (dalam hal ini bernilai 1,96 pada tingkat kepercayaan 95%)

E = error yaitu tingkat kesalahan yang ditentukan (dalam hal ini penulis menetapkan 10% atau 0,10)

P = proporsi atau presentasi yang mempunyai karakteristik tertentu (dalam hal ini penulis menetapkan 50% atau 0,50)

Berdasarkan rumus tersebut, ditetapkan jumlah sampel (n) sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Jumlah Sampel Provinsi DKI Jakarta

No	Wilayah	Populasi
1	Jakarta Barat	2.463.560
2	Jakarta Utara	1.747.315
3	Jakarta Timur	2.843.816
4	Jakarta Selatan	2.185.711
5	Jakarta Pusat	914.182
6	Kep. Seribu	23.340
Total	Provinsi DKI Jakarta	10.177.924

Berdasar rumus Frank Lynch, maka ditetapkan sampel masyarakat Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

$$n = \frac{10177924(1.96^2)0.50(1 - 0.50)}{10177924(0.10)^2 + 1.96^2 0.50(1 - 0.50)}$$

Sehingga ditemukan jumlah sampel (n) sebesar 97 orang.

1.8.5 Jenis Data

Jenis data yang dimiliki penelitian ini berupa dokumen, arsip serta data yang telah ada sebelumnya untuk menilai akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2015-2019. Kemudian peneliti juga melakukan pencatatan hasil wawancara dengan responden (*key informants*) yang mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta untuk mengetahui persepsi birokrat mengenai akuntabilitas kinerja itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan data deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Data deskriptif juga memusatkan perhatian pada permasalahan aktual sebagaimana adanya dalam kurun waktu penelitian berlangsung atau melihat fenomena dalam

kurun waktu yang telah ditentukan dalam penelitian. Peneliti juga berupaya untuk mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang sedang diteliti tanpa memberi perlakuan khusus kepada peristiwa terkait. Data deskriptif yang dimaksud peneliti ialah berupa teks yang merupakan hasil dari pengamatan penulis, wawancara kualitatif serta hasil dari literatur resmi dan literatur dari para ahli yang dapat mendukung atau membenarkan hipotesa yang telah dirancang penulis untuk nantinya akan menjadi jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data atau sumber penulisan penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berupa:

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti langsung dari lapangan tempat melakukan penelitian, melalui wawancara dan observasi mendalam kepada para narasumber terkait dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh bersifat subjektif dikarenakan berasal dari sudut pandang berbeda dari setiap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder peneliti dapat dari kuesioner masyarakat serta penelitian sebelumnya, ataupun melalui berita dikurun waktu tertentu maupun portal digital yang berisikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kurun waktu tahun 2015-2019.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan metode *mix method* atau metode campuran, dimana peneliti menggabungkan penelitian

kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan berasal dari data kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam

Teknik ini merupakan teknik utama dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara *face to face*. Peneliti berusaha melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang dianggap penting untuk dimintai keterangan. Narasumber haruslah orang yang tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait focus penelitian agar penelitian tersebut dapat akurat dan efisien. Dalam wawancara mendalam, peneliti juga berusaha membangun kepercayaan (*trust*) dengan narasumber sehingga data yang didapat lebih lengkap dan jelas. Wawancara mendalam ini akan dilakukan dengan BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui beragam sumber tertulis atau dokumen terkait dengan informan atau tempat dimana informan melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen dalam penelitian ini yakni mengenai akuntabilitas kinerja birokrat di daerah Provinsi DKI Jakarta.

c. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan juga literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Literatur berasal dari buku-buku, jurnal, media cetak serta referensi lain yang terkait dengan penelitian ini sehingga data menjadi lebih lengkap. Data yang digunakan seperti dokumen laporan akuntabilitas kinerja Provinsi DKI Jakarta

kurun waktu 2015-2019, dan dokumen serta jurnal lain yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

d. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang akan menjadi focus penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan nya terhadap para birokrat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

e. Survey

Survey merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Survey bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam melihat akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian dengan metode *mix method*, yakni triangulasi, peneliti sangat memerhatikan informasi yang disampaikan oleh informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis akan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian melakukan reduksi data, koding, analisis hasil penelitian dan berakhir dengan memberikan kesimpulan penelitian.

1.8.9 Kualitas Data

Dalam melakukan validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi, terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi pada situs penelitian yang sebelumnya telah disebutkan oleh penulis.

Triangulasi merupakan metode pendekatan yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Konsep dasarnya ialah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami secara baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi merupakan usaha untuk melakukan pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.¹⁷

Riset data yang diperoleh penulis melalui literatur resmi dan literatur dari para ahli peneliti kumpulkan dengan menggunakan metode *in-depth interview* atau dengan cara wawancara mendalam. Hal ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang diinginkan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan penulis pada penelitian ini, dilengkapi dengan observasi dan survey.

Pada penelitian menggunakan triangulasi, terdapat 3 (tiga) jenis, yakni:

1. Triangulasi Metode

Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi ataupun data melalui cara yang berbeda. Seperti yang telah disebutkan, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey untuk bagian kualitatif.

2. Triangulasi Sumber Data

Teknik triangulasi sumber data yakni menggali kebenaran informasi melalui beragam metode dan dokumen, arsip, serta catatan resmi yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda. Masing-masing langkah tersebut menghasilkan bukti serta pandangan mengenai fenomena yang diteliti sehingga melahirkan spektrum pengetahuan yang lebih luas.

¹⁷ Rahardjo, Mudjia (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.

3. Triangulasi Teori

Hasil penelitian kualitatif yang menghasilkan rumusan informasi, akan dilakukan penyesuaian dengan teori yang relevan. Teknik triangulasi ini memberikan pemahaman mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode, melalui metode pencampuran kualitatif dan kuantitatif. Sehingga analisis akan didasarkan pada data wawancara, observasi dan survey.